

Dualisme Partai Golkar dan Implikasinya Terhadap Pilkada Serentak 2015

Sy.Usmulyadi¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura

Abstrak

Dualisme Partai Golkar antara kubu Munas Bali (ARB) dan Munas Ancol yang tak kunjung usai sejak pengujung 2014, berpotensi merugikan partai tersebut dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan KPU 9 Desember 2015. Fenomena konflik parpol tersebut menarik untuk diteliti secara deskriptif kualitatif karena hendak menggambarkan bagaimana dualisme Partai Golkar berdampak terhadap Pilkada serentak di Kalimantan Barat, dengan subjek paslon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Melawi, Bengkayang, dan Ketapang. Instrumen *framing* sebagai pengumpul data dan analisis media dengan metode konstruktivisme, dimana teori penahapan konflik Fisher untuk analisis datanya. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa dualisme partai berimplikasi pada keikutsertaan Partai Golkar yang hanya bisa tampil di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang dari 7 Kabupaten Pilkada Serentak Kalbar, atau hanya dua paslon dari 20 paslon yang ikut dalam kontestasi pilkada serentak. Resolusi islah atau rekonsiliasi yang diprakarsai para tokoh senior Partai Golkar, ternyata tidak memungkinkan secara efektif mampu mengkonsolidasikan kekuatan kedua kubu, untuk bersinergi dalam setiap tahapan dalam jadwal Pilkada yang sangat ketat. Sehingga beberapa kader menggunakan jalur lain atau prosedur pencalonan independen agar bisa tampil dalam kontestasi Pilkada Serentak Kalbar tahun 2015.

Kata Kunci: *Dualisme Partai, Pilkada Serentak, Implikasi.*

Pendahuluan

Dualisme parpol seperti yang terjadi di Partai Golkar (PG) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyeruak di fase awal kepemimpinan Presiden Jokowi. Fenomena konflik internal yang berujung dualisme pengurus parpol ini mengundang banyak perhatian publik dan pengamat. Kendati merupakan konsekuensi dari iklim demokrasi, dualisme parpol disatu sisi merupakan fakta semakin rentannya parpol terhadap gesekan kepentingan internal maupun eksternal. Jika konsolidasi parpol dalam berdemokrasi gagal mengelola konflik kepentingan tersebut, maka sangat mungkin akan menambah gerbong baru dalam deret peserta pemilu kedepan. Bukankah berkembangnya parpol hingga sekarang ini tidak terlepas dari kegagalan parpol lama didalam mengelola konflik kepentingan-nya?.

Akar konflik maupun dinamika masing-masing parpol memang tidak bisa digeneralisir begitu saja, mengingat keunikan dari parpol-parpol tersebut baik dalam peta konflik maupun resolusi yang mereka tempuh. Termasuk penelitian ini, tim peneliti akan membatasi pada dualisme PG dalam konteks pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung di pengujung 2015. Dualisme PG dalam dikotomi kubu yang berseteru yakni kubu Abu Rizal Bakrie (ARB) versus kubu Agung Laksono (AL) cukup menarik perhatian publik, baik di media massa maupun sosial media. Banyak tokoh-tokoh berpengaruh di intra dan ekstra PG terlibat langsung maupun tak langsung dalam upaya penguatan masing-masing kubu atau berupaya mendorong rekonsiliasi. Indra Piliang kader muda PG yang kini menjabat Ketua Staf Ahli Menteri PANRB, mengakui bahwa konflik PG kali ini

1 Dosen Ilmu Politik di FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

adalah yang terbesar sepanjang sejarah. (Selasar, 2015).

Belakangan muncul istilah Musyawarah Nasional (Munas) Tandingan dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Tandingan di dalam tubuh Partai Golkar. Tudingan itu ditujukan terhadap Munas yang berlangsung di Ancol, Jakarta, pada tanggal 6-8 Desember 2014, termasuk keputusan-keputusannya. Sebab, pada tanggal 30 November sampai 2 Desember 2014, juga berlangsung Munas di Bali. Dua struktur kepengurusan pun sudah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM guna diverifikasi dan dinyatakan sebagai kepengurusan yang sah menurut hukum yang berlaku.

Banyak pendapat berbagai kalangan masyarakat yang berkembang di media massa menyangkut Munas mana yang legal dan yang tidak. Termasuk putusan-putusan yang sudah diambil. Di luar itu, konflik yang dihadapi Partai Golkar sekarang adalah konflik terbesar sepanjang sejarah partai moderen ini. Dalam usia 50 tahun, partai politik tertua ini justru mengalami masalah yang akan mengubah wajah Partai Golkar ke depan. Bukan hanya sisi legalitas, melainkan juga dalam kaitannya dengan konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan.

Sehingga, diperlukan kehati-hatian dalam menyelesaikan masalah ini, baik dari kalangan internal Partai Golkar, maupun pihak terkait termasuk dan terutama pemerintah dan lembaga peradilan. Apabila penanganan yang dilakukan emosional dan berdasarkan "pamer kekuasaan" semata, dikhawatirkan Partai Golkar dapat mengalami konflik permanen, struktural dan masif yang kian sulit dicarikan jalan keluarnya. Konflik yang selama ini terkelola dengan baik, hanya berlangsung secara tertutup, belakangan menjadi terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.

Konflik Partai Golkar disangsikan dapat teratasi dalam waktu singkat. Selama undang-undang yang mengatur mereka diabaikan, konflik kedua partai peninggalan Orde Baru ini tidak akan pernah selesai. Menurut Ketua Populi Center, Nico Harjanto mekanisme penyelesaian konflik parpol itu adalah harus berdasarkan undang-undang parpol yakni

Mahkamah Partai, namun sayangnya kewenangan Mahkamah Partai pun dimentahkan oleh internal partai. Imbasnya Golkar dan PPP terancam tidak dapat mengikuti Pilkada serentak. Terkait ancaman batalnya Golkar dan PPP gagal mengikuti Pilkada, Nico beranggapan bahwa kualitas Pilkada tidak akan hilang kualitasnya. (Sindonews, 2015).

Dalam hal itu, pengamat politik ini mengingatkan, proses Pilkada bukan murni urusan partai politik, melainkan penilaian masyarakat terhadap figur calon kepala daerah yang dianggap mumpuni, karena tujuannya untuk mencari pemimpin yang baik dan merakyat. Pada bagian lain, PG kubu ARB meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantu PG agar dapat mengikuti perhelatan Pilkada 2015. Hal ini dinyatakan Ketua DPP PG Firman Soebagyo menurutnya KPU harus membantu partai yang mengalami konflik dualisme agar bisa ikut pilkada. Sangat ironis, jika KPU tetap bersikukuh untuk menggunakan Undang-undang (UU) Pilkada yang lama. Ada kemungkinan partai yang berkonflik terancam tidak dapat mengikuti pilkada.

Teori Konflik

Teori konflik adalah suatu perspektif atau cerminan dalam ilmu sosial yang menekankan ketimpangan sosial, politik atau material dari suatu kelompok sosial, bahwa ruang lingkup dari teori ini amatlah luas, yang mencakup sistem sosial-politik. Teori konflik menekankan perhatian pembahasannya kepada beberapa persoalan seperti perbedaan kekuasaan, konflik kelas, dan umumnya adalah kontras ideologi historis yang dominan. Istilah "konflik" secara etimologis berasal dari bahasa Latin *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan. Di satu sisi, "konflik" dalam kehidupan sosial menurut Surbakti (1984:21-32) berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih.

Konflik dalam ilmu politik menurut Surbakti (1999:75) seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung

pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud kekerasan dan ada pula konflik yang tak berwujud kekerasan.

Fisher, dkk (1964) menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda, tahapan-tahapan ini adalah : (1) Pra-Konflik : merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain. (2) Konfrontasi : pada saat ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. (3) Krisis : ini merupakan puncak konflik ketika ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunitas normal diantara kedua pihak kemungkinan putus pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya. (4) Akibat: kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Satu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian. (5) Pasca-konflik: akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan.

Dampak Konflik

Menurut Fisher (1964) Suatu Konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi ada kalanya konflik juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari suatu konflik adalah sebagai berikut : (1) Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas. (2) Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. (3) Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara anggota kelompok. (4) Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu atau kelompok. (5) Konflik dapat memunculkan kompromi baru. Dampak negatif dari suatu konflik adalah sebagai berikut : (1) Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. (2) Kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. (3) Berubahnya kepribadian para individu atau anggota kelompok. (2) Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

Ada 7 (tujuh) kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada tahun 2015, karena masa jabatan bupati di enam kabupaten itu habis masanya pada tahun 2015. Enam kabupaten tersebut antara lain, Sambas, Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Melawi, Bengkayang, dan Ketapang (KPU Kalbar, 2015) .

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan maka masalah penelitian dibatasi pada isu dualisme Partai Golkar dan implikasinya terhadap Pilkada Serentak di Kalimantan Barat. Maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dualisme kepengurusan Partai Golkar menemukan resolusi yang disepakati kedua pihak dalam rangka keikutsertaan Pilkada serentak?
2. Apakah dualisme kepengurusan Partai Golkar menemui kendala dalam proses dan tahapan Pilkada serentak di Kalimantan Barat?

Metode

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif karena hendak menggambarkan bagaimana dualisme Partai Golkar berdampak terhadap Pilkada serentak di Kalimantan Barat. Subyek Penelitian: Pasangan Calon Pilkada Serentak di Kalimantan Barat. Objek penelitian adalah dualisme Partai Golkar dan implikasinya terhadap Pilkada Serentak 2015 di Kalimantan Barat. Lokasi Penelitian: 7 Kabupaten yang ikut dalam Pilkada serentak yakni Sambas, Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Melawi, Bengkayang, dan Ketapang.

Instrumen pengumpul data bersifat media daring yang memberitakan perkembangan terkini terkait topik dualisme dan kesertaan Partai Golkar dalam Pilkada serentak di Kalimantan Barat. Observasi, dengan teknik pengumpulan data ini peneliti dapat merekam berbagai fenomena yang terjadi baik di lokasi penelitian maupun situasi diluar lokasi yang relevan dengan subyek penelitian termasuk menghimpun, memilah, mengidentifikasi dan menafsirkan data yang beredar di media massa atau media *online* baik lokal dan nasional terkait *angle*, topik dan *content* berita (news) atau opini dan wacana (artikel) seputar isu dualisme kepengurusan Partai Golkar dalam kaitannya dengan Pilkada serentak.

Prosedur dan analisis data berupa analisis media dengan metode konstruktivisme. Biasa

juga disebut analisis wacana sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subyek yang mengemukakan suatu pertanyaan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari sang pembicara. Analisis ini biasa disebut Analisis *Framing*. Analisis Framing lebih bersifat kualitatif yang menekankan pada pemaknaan teks daripada penjumlahan unit kategori seperti dalam analisis isi. Dasar yang dipakai adalah interpretasi, karena analisis framing merupakan bagian dari metode interpretatif yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran peneliti (Bahrin, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Tahapan Konflik Partai Golkar

Konflik Partai Golkar (PG) dapat dianalisis dengan beragam cara dan pendekatan, diantaranya dari perspektif tahapan konflik Fisher, dkk (1964). Dengan menggunakan alat analisis ini, maka konflik PG digambarkan dari tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda, tahapan-tahapan ini adalah : pra konflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik (gambar 1)



Gambar 1
Tahap Konflik

Selanjutnya tim peneliti mengulas peristiwa-peristiwa konflik PG yang mencuat di media dan menjadi perhatian publik. Fenomena konflik yang mengemuka tersebut kemudian dideskripsikan menurut tahapan konflik dimaksud, yakni (1) Pra-Konflik : merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak yakni PG kubu Abu Rizal Bakrie (ARB) dan PG kubu Agung Laksono (AL) di jajaran elit pusat partai tersebut, sehingga timbul konflik.

Awalnya konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. (2) Konfrontasi: pada saat ini konflik PG dideskripsikan menjadi semakin terbuka ditandai dengan para pendukung yang mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. (3) Krisis : ini merupakan puncak konflik PG ketika ketegangan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode “pertempuran”, ketika

kader, simpatisan atau pendukung dari kedua kubu saling menjatuhkan dengan berbagai cara, baik tindak ataupun pernyataan-pernyataan umum yang cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya hingga kepada upaya menempuh jalur hukum. (4) Akibat: perseteruan kedua kubu PG berakibat kontraproduktif bagi PG secara menyeluruh termasuk menyongsong Pilkada serentak 2015. Pada fase ini kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi atau islah dengan atau tanpa perantara. Satu pihak yang mempunyai otoritas di PG atau pihak ketiga seperti Pemerintah yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian. (5) Pasca-konflik: akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi yang meresahkan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak.

Tahap Pra Konflik Dualisme Partai Golkar

Ada sedikitnya 8 peristiwa yang termasuk dalam kategori tahapan pra konflik PG yakni: (1) Regenerasi dan Struktur PG; (2) Mandat Rapimnas VI PG kepada Ketum PG Abu Rizal Bakrie (ARB); (2) Pengusungan Capres dan Cawapres yang kemudian kalah pada Pilpres 2014; (3) Polemik pelaksanaan Munas; (4) Pencopotan dan pergeseran jabatan pengurus PG oleh kubu ARB; (5) Polemik voting UU Pilkada di DPR; (6) Mobilisasi dukungan pencalonan ARB sebagai Ketum PG kedua kalinya; (7) Manuver mendorong munas kubu ARB dalam rapat pleno DPP; (8) Pembahasan agenda munas dalam Rapimnas VII PG di Yogyakarta.

Tahap Konfrontasi Dualisme Partai Golkar

Tahap konfrontasi ditandai dengan konflik yang bersifat tertutup kemudian menjadi konflik terbuka. Beberapa fakta peristiwa konflik atas dualisme PG yang tergolong masuk tahapan konfrontasi ini adalah: (1) Kericuhan Rapat Pleno PG dan bentrok simpatisan/kader di kantor DPP PG Jakarta; (2) Munas PG ARB di Bali vs Munas PG AL di Jakarta; (3) Kontroversi keputusan Mahkamah Partai; (4) Saling serang, hujat dan pecat antar 2 kubu; (5) Penguasaan sepihak kubu AL atas

kantor DPP PG dan penolakan Polri terhadap permintaan kubu ARB untuk pengosongan kantor; (6) PTUN mengabulkan permohonan banding Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas hasil PTUN tingkat pertama kubu ARB; (7) Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan PG kubu ARB; (8) Perayaan HUT PG dan syukuran PG kubu ARB terkait kemenangan atas gugatan di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara. Kesemua indikator tahap konfrontasi itu kemudian dikaji secara framing media sebagai berikut:

Tahap Krisis Dualisme Partai Golkar

Setelah melalui tahapan konflik konfrontasi, selanjutnya dideskripsikan derajat konflik krisis walaupun konstelasi krisis bukan pada kondisi perang/pertempuran senjata sebagaimana dimaksud oleh Fisher, dalam konteks ini krisis dipahami sebagai perseteruan kubu ARB dan AL di medan konflik hukum dan politik. Gambaran tahapan krisis PG ini dideskripsikan secara framing media atas beberapa peristiwa berikut: (1) PG dalam krisis Pilkada; (2) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara; (3) Putusan MA dan penolakan Munas oleh kubu ARB; (4) Kasasi kubu AL terhadap Putusan MA.

Tahap Akibat dalam Dualisme Partai Golkar

Tahap keempat setelah fase krisis ini, yakni tahap "Akibat" yang cenderung menggambarkan kondisi yang bersifat kompromistis, dimana kedua kubu atau melalui pihak lain mulai membuka kemungkinan untuk saling memahami dalam proses islah diantara mereka. Gambaran faktual dari tahap akibat dalam konteks ini terdiri: (1) Islah demi Pilkada; (2) Point kesepakatan dalam islah terkait Pilkada; (3) Pertemuan 2 kubu di Forum Silatnas PG; (4) Peran para pihak dalam proses islah PG.

Tahap Pasca Konflik dalam Dualisme Partai Golkar

Setelah tahap sebelumnya dilalui PG mulai fase pra konflik, konfrontasi, krisis, dan akibat, maka perkembangan selanjutnya yang dapat dipantau adalah fase pasca krisis,

dengan mencermati dua peristiwa berikut: (1) Putusan MA dan Munas; (2) Sikap Menkumham terhadap Putusan MA; (3) Penurunan baliho kubu AL di kantor DPP PG.

Pilkada Serentak Kalimantan Barat

Dalam Peraturan KPU nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, yang dikutip detikcom, tahapan pemilihan terdiri atas persiapan dan

penyelenggaraan. Tahapan persiapan yaitu perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis dan lainnya. Sementara tahapan penyelenggaraan adalah pencalonan, sengketa Tata Usaha Negara, kampanye, audit dana kampanye, dan lainnya. Berikut tahapan penting Pilkada 2015 yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015.

Tahapan Pilkada.

Alur Tahapan dan Jadwal Pilkada Serentak



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Tahapan pendaftaran pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati di tujuh kabupaten se- Kalimantan Barat sesuai jadwal Pilkada Serentak dari KPU berakhir 28 Juli 2015. Berdasar itu, sumber KPU Kalbar menyebutkan terdapat 22 pasangan calon telah mendaftar ke KPU kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015.

“Dari 22 pasangan calon yang mendaftar ke KPU di tujuh kabupaten terdapat 21 pasangan calon yang resmi diterima. Sementara satu pasangan calon di Kabupaten Ketapang dikarenakan dukumen syarat pencalonannya tidak lengkap, sehingga proses pendaftaran pasangan calon tersebut tidak dapat diterima KPU Kabupaten Ketapang,” kata Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty (KPU Kalbar, 2015).

Menurut Umi berdasarkan laporan dari KPU Kabupaten dari 21 pasangan calon yang pendaftarannya diterima KPU di tujuh kabupaten terdapat lima pasangan calon bupati

dan calon wakil bupati yang mendaftar melalui jalur perseorangan. Sedangkan 16 pasangan calon lainnya diusung partai politik dan gabungan partai politik.

“Lima pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan tersebut, yakni tiga pasangan calon mendaftar di KPU Kabupaten Ketapang sedangkan dua pasangan calon masing-masing mendaftar di KPU Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sekadau,” jelas Umi (KPU Kalbar, 2015).

Adapun rincian 21 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diterima pendaftarannya tersebut antara lain di Kabupaten Ketapang terdapat lima pasangan calon, Kabupaten Sambas tiga pasangan calon, Kabupaten Bengkayang dua pasangan calon, Kabupaten Kapuas Hulu dua pasangan calon, Kabupaten Sekadau empat pasangan calon, Kabupaten Sintang tiga pasangan calon dan Kabupaten Melawi dua pasangan calon.

Ditambahkan Umi Rifdiyawaty, dari tujuh kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak jumlah pasangan calon yang mendaftar lebih dari satu pasangan calon, sehingga dipastikan KPU di tujuh kabupaten tidak melakukan perpanjangan masa tahapan pendaftaran. Selanjutnya sampai penelitian ini dilaporkan, KPU kabupaten masih melakukan penelitian terhadap dokumen pencalonan yang sudah

disampaikan pada saat pendaftaran kemarin. KPU menghimbau agar pasangan calon segera mempersiapkan segala dokumen yang belum lengkap untuk dilengkapi pada masa perbaikan, mengingat masa perbaikan yang sangat singkat yaitu mulai tanggal 4 sampai dengan 7 Agustus 2015.

Tabel.1 Bakal Calon Pilkada Serentak Kalbar 2015

	Kab	Pasangan Balon Bupati/Wakil Bupati	Pengusung	
			Perorangan	Partai (kursi)
1	Ketapang	Andi Djamirudin- Chanisius Kuan	-	PDIP (9) Hanura (5) Demokrat (5) PKB (2)
2		Boyman Harun- Gurdani Ahmad	-	PAN (6) Nasdem (3)
3		Henrikus-Gusti Kamboja	-	Golkar (8) Gerindra (3)
4		Martin Rantan-Suprpto	32.997	-
5		Aswin Fuad-Suwignjo	23.961	-
6		H Darmansyah- Uti Rushan ST	30.864	-
7	Sambas	Tony Kurniadi ST MSi- Hj Eka Nurhayati SE	38.349	-
8		H Atbah Romin Suhaili- Hj Hairiah	-	PKS (4) PPP (4) Gerindra (5) Hanura (3)
9		Hj Juliarti Djuhardi Alwi- H Hasanusi	-	PAN (6) PDIP (6) Demokrat (4) Nasdem (4) PBB (1)
10	BKY	Sebastian Darwis SE- Rurakhmad	-	PDIP (6)
11		Suryatman Gidot- Agusinus Naon	-	Gerindra (4) Hanura (4) Nasdem (4) PAN (1)
12	Sekadau	Rupinus-Aloysius	-	PDIP (6) Demokrat (4) PKPI (3)
13		Simson-Subarno	-	Hanura (4) Nasdem (3) Gerindra (4)
14		Yansen Effendy-Saharudin	-	PAN (3) Golkar (3)
15		Pensong-Among	10.870	-
16	Sintang	Ignasius Juan-Senen Maryono	-	PDIP (6) Hanura (2) PAN (2) PKPI (3) Demokrat (4)
17		Agrianus-Chomain Wahab	-	Gerindra (5) PKB (4)
18		Jarot Winarno-Askiman	-	Nasdem (5) Golkar (3) PPP (1)
19	Melawi	Panji-Dadi Sunarya	-	PDIP (5) Nasdem (2) Hanura (1)
20		Firman Muntaco- Jhon Murkanto	-	Golkar (6) Gerindra (4) PAN (3) PKS (2) PPP (2) Demokrat (2) PKB (2) PKPI (2)
21	Kapuas Hulu	Fransiskus Diaan SH- Andi Aswad SH	-	PDIP (4) Demokrat (3) Hanura (2)
22		AM Nasir SH- Antonius L Ain Pamero	-	PPP (5) Golkar (4) PKPI (3) Gerindra (3) PAN (2) PKS (1) PKB (1) Nasdem (2) PBB (0)

Sumber: di olah dari Tribun Pontianak, 2015

Penetapan Pasangan Calon Pilkada

Setelah melalui serangkaian prosedur dalam tahapan Pilkada serentak, sesuai jadwal KPU pada 24 Agustus 2015 telah ditetapkan 20 pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati di 7 Kabupaten, yakni Sambas, Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Ketujuh kabupaten di Kalbar tersebut adalah bagian dari 269 daerah Pilkada serentak secara nasional yang diselenggarakan pemungutan suaranya pada 9 Desember 2015.

Secara dukungan politik, Pilkada serentak di Kalbar sebanyak 15 paslon atau 75% masih didominasi gabungan parpol, 1 paslon diusung parpol tunggal, dan 4 paslon atau 20% dari jalur perseorangan. Jalur independen, dari 5 bakal calon yang mendaftar 4 diantaranya lolos ke tahap penetapan paslon yakni 1 paslon di Kabupaten Sambas, 1 paslon di Kabupaten Sekadau, dan 2 paslon di Kabupaten Ketapang.

Dari 12 parpol peserta Pemilu 2014, hanya lima parpol tampil mengusung paslon nya di seluruh kabupaten, yaitu Partai NasDem, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, dan Partai Hanura. Sedangkan Partai Golkar dan PPP yang mengalami dualisme kepengurusan juga berdampak pada minimnya kepesertaan kedua partai tersebut di Pilkada. Dilihat dari paslon yang definitif dari KPU, Partai Golkar hanya bisa tampil di Pilkada Sekadau dan Sintang.

Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Sambas

Kontestasi Pilkada serentak di Kabupaten Sambas terdiri 3 paslon yakni paslon petahana Juliarti, satu paslon dari jalur perseorangan dan satu paslon dari partai politik. Petahana dalam pencalonan keduanya sebagai bupati tidak lagi berpasangan dengan Pabali Musa, wakil bupatinya namun kini memilih berpasangan dengan Hasanusi yang merupakan salah satu penantangannya pada Pilbup 2011 dulu.

Isu kesetaraan gender juga menarik dalam Pilkada Sambas mengingat dari ketiga paslon yang bertarung, masing-masing menghadirkan figur perempuan 2 sebagai wakil dan 1 sebagai bupati. Kabupaten Sambas pula yang menjadi pioner atau satu-satunya peserta Pilkada serentak Kalbar 2015 yang memiliki calon perempuan, sebagai indikasi menguatnya proses pemberdayaan politik perempuan di

daerah ini. Terlebih bila dilihat latar belakang paslon perempuan ini juga tidak bersifat instan, karena telah matang dalam kiprah dan pengalaman di pentas politik daerah sebelumnya.

Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Bengkayang

1		2	
Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
			
Sebastianus Darwis, S.E., M.M.	Rurakhmad	Suryadman Gidot, M.Pd.	Agustinus Naon, S.Sos.
Pengusung:  23.035 (18,8%) suara dan 6 (20,0%) kursi		Pengusung:  50.346 (42,3%) suara dan 13 (43,3%) kursi	
Visi: "Terwujudnya MASA (Masyarakat Adil, Sejahtera, dan Aman) di Kabupaten Bengkayang."		Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang Sejahtera, Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing."	

Sumber: KPU

Kontestasi Pilkada serentak di Kabupaten Bengkayang, diikuti 2 paslon sama halnya Melawi dan Kapuas Hulu yang *head to head* bertarung dalam pemilu kali ini. Paslon nomor urut 2 yakni Suryadman Gidot-Agustinus Naon tampak masih solid untuk kembali maju bersama sebagai paslon petahana. Fenomena ini pun tergolong langka dalam kontestasi politik tanah air, mengingat umumnya petahana akan berganti pasangan pada pemilu berikutnya. Hal unik lain yang cukup langka adalah dukungan parpol tunggal dalam kontestasi Pilkada, dimana paslon Sebastianus Darwis, mantan Ketua DPRD Bengkayang berpasangan Rurakhmad merupakan satu-satunya paslon di Kalbar yang diusung oleh satu parpol yakni PDIP. Ini mengisyaratkan derajat kekuatan dan kepercayaan diri parpol yang tinggi, sehingga PDIP Bengkayang lebih mantap mengusung sendiri kader terbaiknya.



**Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau
 (9 Desember 2015)**



1	2	3	4
 Calon Bupati Calon Wakil Bupati	 Calon Bupati Calon Wakil Bupati	 Calon Bupati Calon Wakil Bupati	 Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Pengusung: Perseorangan 23.484 (31,4%) dukungan	Pengusung: 45.067 (30,8%) suara dan 13 (40,3%) kursi	Pengusung: 43.422 (37,4%) suara dan 13 (36,7%) kursi	Pengusung: 16.912 (14,6%) suara dan 6 (20,0%) kursi
Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sekadau yang Maju, Mandiri, dan Dinamis."	Visi: "Terwujudnya Kabupaten Sekadau yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing."	Visi: "Mewujudkan Sekadau Menjadi Kabupaten EMAS (Ekonomi Masyarakat Meningkat, Aman, dan Sejahtera)."	Visi: "Terwujudnya Kabupaten Sekadau yang Lebih Maju, Merata, dan Sejahtera."

Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Sekadau

Konstestasi Pilkada Serentak di Kabupaten Sekadau diikuti 4 paslon 1 diantaranya adalah paslon perseorangan. Dualisme Partai ternyata tidak berdampak pada keikutsertaan Golkar dalam Pilkada di daerah ini, terlihat dari figur Yansen-Saharudin yang diusung Partai Golkar dan PAN. Paslon yang didukung Golkar ini bertarung pada 9 Desember 2015 menghadapi paslon lain yang didukung parpol besar lainnya seperti Rupinus-Aloysius yang diusung PDIP, Demokrat dan PKPI. Kemudian Simson-Paulus yang diusung Gerindra, Nasdem, dan Hanura.

Pasangan Calon Kabupaten Sintang

Konstestasi Pilkada Serentak di Kabupaten Sintang diikuti 3 paslon yang ketiganya diusung parpol. Tidak ada paslon perseorangan Pilkada di daerah ini. Sama halnya di Sekadau,

dualisme Partai Golkar juga tidak menghambat paslon Jarot-Askiman untuk maju, karena dengan diusung Partai Golkar, Nasdem dan PPP, mereka bisa tampil dalam Pilkada serentak ini.

Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Melawi

Konstestasi Pilkada Serentak di Kabupaten Melawi diikuti 2 paslon sama halnya Bengkayang dan Kapuas Hulu, pilkada kali ini *head-to-head* petahana Firman Muntaco versus Panji. Dualisme Partai Golkar dan PPP juga berdampak pada tidak tampilnya kedua parpol ini mendukung Firman-John, dimana Firman Muntaco adalah Ketua Partai Golkar Melawi. Dengan alasan sama pula, dukungan PPP (kubu Romahurmuziy) ke Firman-John juga ditolak KPU. Namun pasangan Firman-John tetap bisa maju karena gabungan dukungan partai-partai lain memenuhi syarat minimal.



**Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang
 (9 Desember 2015)**



1	2	3
 Calon Bupati Calon Wakil Bupati	 Calon Bupati Calon Wakil Bupati	 Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Pengusung: 50.954 (21,5%) suara dan 9 (25,7%) kursi	Pengusung: 110.462 (46,6%) suara dan 17 (48,6%) kursi	Pengusung: 58.746 (24,8%) suara dan 9 (25,7%) kursi
Visi: "Terwujudnya Perubahan Masyarakat Kabupaten Sintang yang Adil, Berkualitas, Berintegritas, dan Unggul Secara Ekonomi, serta Sejahtera Berlandaskan Etika dan Norma yang Tangguh (Pasak Bumi Senentang)."	Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Bersatu, Sejahtera, dan Berkedaulatan Rakyat."	Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2020."

**Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi
 (9 Desember 2015)**

1		2	
Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
Panji, S.Sos.	Dadi Sunarya Usfa Yursa, A.Md.	H. Firman Muntaco, S.H., M.H.	Drs. John Murkanto Ajan, M.Si.
Pengusung: 		Pengusung: 	
41.352 (29,5%) suara dan 8 (26,7%) kursi		63.301 (46,6%) suara dan 15 (50,0%) kursi	
Visi: "Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera dan Bersumber Daya, Berdaulat, Berdikari, dan Berkepribadian dengan Pelayanan Pemerintahan yang Berkualitas."		Visi: "Terwujudnya Masyarakat Melawi yang Cerdas, Dinamis, Aman, Adil, Sejahtera, dan Berkepribadian."	

**Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu
 (9 Desember 2015)**

1		2	
Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
A.M. Nasir, S.H.	Antonius L. Ain Pamero, S.H.	Fransiskus Diaan, S.H.	Andi Aswad, S.H.
Pengusung: 		Pengusung: 	
81.768 (58,0%) suara dan 17 (56,7%) kursi		38.502 (27,3%) suara dan 9 (30,0%) kursi	
Visi: "Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, dan Harmonis."		Visi: "Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Sejahtera, Sehat, Cerdas, Aman, Beriman, dan Berbudaya."	

Sumber: KPU

Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Kapuas Hulu

Kontestasi Pilkada Serentak di Kabupaten Kapuas Hulu di ikuti 2 paslon sama halnya Bengkayang dan Melawi. Kedua paslon diusung gabungan parpol dimana petahana Natsir menghadapi penantangannya Fransiskus Diaan. Paslon A.M. Nasir selaku petahana memiliki pasangan baru, Antonius L. Ain Pamero yang merupakan salah satu pesaingnya pada pilbup sebelumnya. Dualisme Partai Golkar juga berdampak terhadap andil partai ini dalam mengusung kadernya sehingga tidak ikut berpartisipasi dalam Pilkada serentak di Kapuas Hulu. Pasangan Nasir-Ain diusung koalisi tujuh parpol yang merupakan koalisi terbesar pada pilkada di Kalbar tahun ini, baik dari segi jumlah parpol, maupun dari segi persentase perolehan suara dan kursi.

Pasangan Calon Kabupaten Ketapang

Kontestasi Pilkada Serentak di Kabupaten Ketapang diikuti 4 paslon yang berimbang karena 2 paslon jalur perseorangan dan 2 paslon jalur pengusung gabungan parpol. Dari ketujuh Pilkada serentak di Kalbar, Pilkada Ketapang cukup menarik perhatian. Sejak awal tahapan pendaftaran saja, Ketapang termasuk rekor terbanyak bakal calon. Sekitar tujuh pasangan bakal calon mendaftar ke KPU Ketapang dan tiga pasangan bakal calon digugurkan oleh KPU. Keempat pasangan calon yang resmi bertarung dalam Pilkada serentak ini sedangkan tiga pasangan bakal calon lainnya gagal karena bermacam faktor seperti syarat dukungan minimal yang tidak cukup, termasuk dampak dari dualisme partai yang melanda Golkar membuat terhalangnya kader partai ini mengikuti Pilkada Ketapang dan maju lewat jalur independen.

**Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang
 (9 Desember 2015)**

1		2		3		4	
Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati
Martin Rantan, S.H.	Drs. Suprpto S.	Drs. Andi Djamiruddin, M.Si.	Chanisius Kuan	H. Boyman Harun, S.H.	Drs. H. Gurdani Achmad	Ir. H. Darmansyah, M.M.	Uti Ruslan, S.T.
Pengusung: Perseorangan		Pengusung: 		Pengusung: 		Pengusung: Perseorangan	
52.445 (9,3%) dukungan		37.083 (34,0%) suara dan 16 (51,6%) kursi		44.287 (17,3%) suara dan 9 (29,0%) kursi		47.254 (8,2%) dukungan	
Visi: "Kabupaten Ketapang yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera."		Visi: "Terwujudnya Kabupaten Ketapang yang Maju dan Mandiri."		Visi: "Terwujudnya Kabupaten Ketapang yang Maju dan Aman serta Didukung Aparat Pemerintahan yang ABDI (Amanah, Berwibawa, Disiplin, dan Inovatif) bagi Masyarakat."		Visi: "Mewujudkan Kabupaten Ketapang yang Tentram, Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat."	

Dualisme Partai Golkar dan Pilkada Kalbar

Konsekuensi dualisme PG di tingkat DPP juga menyebar di tingkat DPD I dan DPD II di berbagai daerah, tak terkecuali di Kalbar. Dampaknya terhadap Pilkada Serentak sangat krusial bagi PG dalam keikutsertaan mereka mengusung kader atau pasangan calon lain, tanpa penolakan atau hambatan saat pendaftaran dan penetapan paslon. Beberapa peristiwa yang mengindikasikan dualisme PG di DPD I dan DPD II di Kalbar, akan dikaji secara framing media terhadap fakta-fakta berikut: (1) Soliditas PG Kalbar versi Munas Bali (ARB); (2) Pengukuhan Plt Ketua PG Kalbar dan Kab/Kota; (3) Rapat koordinasi jelang Pilkada dan Musda PG Kalbar.



Implikasi Dualisme Partai Golkar terhadap Pilkada

Berdasarkan bahasan dinamika politik terkait dualisme PG sebelumnya, maka konflik dualisme PG dalam konteks Pilkada Serentak di Kalbar adalah sebagai berikut:

- Dari 7 Pilkada Serentak di Kalbar, Partai Golkar hanya bisa tampil di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang;
- Dari 20 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Golkar bersama partai pengusung yang lain, hanya bisa mengusung dua paslon yakni Yansen Akun-Saharudin di Pilkada Sekadau dan Jarot-Askiman di Pilkada Sintang;
- Keikutsertaan Partai Golkar di Pilkada Kabupaten Sambas, Bengkayang, Melawi, Kapuas Hulu dan Ketapang terkendala secara langsung dan tak langsung oleh dualisme Partai Golkar sehingga menghilangkan

kesempatan Partai Golkar untuk mengusung kader atau paslon bersama partai yang lain;

- Implementasi kesepakatan islah khusus pada 30 Mei 2015 dan islah kesepakatan kedua pada 11 Juli 2015 tidak memungkinkan secara efektif mampu mengkonsolidasikan kekuatan kedua kubu untuk bersinergi dalam tahapan Pilkada dengan jadwal yang sangat ketat.
- Peluang PG untuk menang dalam Pilkada Serentak di Kalbar bertumpu pada kemampuan mendongkrak perolehan suara paslon Yansen Akun-Saharudin dan Jarot-Askiman, juga kader Golkar lain yang menggunakan jalur perseorangan maupun diusung partai lain seperti di Ketapang, Melawi dan Bengkayang.

Simpulan

Berdasarkan bahasan dinamika politik terkait dualisme PG sebelumnya, termasuk analisis tahapan konflik yang terjadi di tubuh DPP PG kubu ARB dan AL, dan eskalasinya di tingkat DPD I dan DPD II di Kalimantan Barat baik itu dualisme pengurus versi ARB dan AL, Musda dan kendala langsung maupun tak langsung terkait tahapan pilkada yang ditempuh PG, maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 7 Pilkada Serentak di Kalbar, Partai Golkar hanya bisa tampil di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang;
2. Dari 20 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Golkar bersama partai pengusung yang lain, hanya bisa mengusung dua paslon yakni Yansen Akun-Saharudin di Pilkada Sekadau dan Jarot-Askiman di Pilkada Sintang;
3. Keikutsertaan Partai Golkar di Pilkada Kabupaten Sambas, Bengkayang, Melawi, Kapuas Hulu dan Ketapang terkendala secara langsung dan tak langsung oleh dualisme Partai Golkar sehingga menghilangkan kesempatan Partai Golkar untuk mengusung kader atau paslon bersama partai yang lain;
4. Implementasi kesepakatan islah khusus pada 30 Mei 2015 dan islah kesepakatan kedua pada 11 Juli 2015 tidak

memungkinkan secara efektif mampu mengkonsolidasikan kekuatan kedua kubu untuk bersinergi dalam tahapan Pilkada dengan jadwal yang sangat ketat.

5. Peluang PG untuk menang dalam Pilkada Serentak di Kalbar bertumpu pada kemampuan mendongkrak perolehan suara paslon Yansen Akun-Saharudin dan Jarot-Askiman, juga kader Golkar lain yang menggunakan jalur perseorangan maupun diusung partai lain seperti di Ketapang, Melawi dan Bengkayang.

Referensi

- Amal, Ichsanul, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, 1998
- Arifin, Anwar, *Opini Publik*, Pustaka Indonesia, 2008
- Arsyad, Rahman M, 2014, *Perang Kota (Studi Politik Lokal dan Kontestasi Elite Boneka)*, Maguwaharjo Depok Sleman Jogjakarta: Resist Book.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chafee, Steven H, *Political Communication*, Volume VII, Sage Publication, 1975
- Corner, John & Pels, Dick, *Media and the restyling of politics: consumerism, celebrity and cynicis*, Sage Publication, 2003
- Coser, Lewis. 2009, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dean, Pruilt dan Rubbin Jefry, 2004, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denton, Jr, Robert, E (ed), *Political Communication Ethics, An Oxymoron?*, Praeger Publisher, 2000
- Duverger, Maurice, 1982, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Press. , 1988, *Partai Politik dan Kelompok Kepentingan*,
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip, "Pengantar Sosiologi Politik", KENCANA PRENADAMEDIA GROUP. Jakarta, 2013. Hlm. 277 – 278
- Firmansyah, *Marketing Politik*, Yayasan Obor indoneisa, 2007
- Fisher, R, 1964, *Fractionating conflict*. Dalam R. Fisher, ed. *International conflict and behavioral science: the craigville papers*, New York: Basic Books.
- Fisher, R. 1964. *Fractionating conflict*, ed. *International conflict and behavioral science: the craigville papers*. New York: Basic Books.
- Fisher, R. 1964. *Fractionating conflict*. Dalam R. Fisher, ed. *International conflict and behavioral science: the craigville papers*. New York: Basic Book
- Franklin, Bob, *Packaging Politics*, First Publisher, Great Britain, Edawrd Arnold, 1994
- Griffin, EM, *A First Look at Communication Theory*, Fifth edition, New York, 2003
- Hamad, Ibnu, "Menggugat Pers dan Partai Politik dalam Panggung Wacana Politik Indonesia" dalam Mahrus Irsyam & Lili Romli (ed), *Menggugat Partai Politik*, Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2003
- Haris, Syamsudin, 'Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Politik Masa Orde Baru' *Jurnal Analisis CSIS*, 1988. hlm.271.Yogyakarta.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Penerbit buku Kompas, 2003
- Hidayat, Dedy N, *Pers dalam "Revolusi Mei", Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- JA, Denny, *Melewati Perubahan Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia*, LkiS, Yogyakarta, 2006 Jakarta: Rajawali Press.
- Jamieson, Kathleen Hall, *Packaging Presidency, A History and Criticism of Presidential Campaign Advertising*, Third edition, Oxford University Press, 1996
- Kavanagh, Dennis, *Ellection Campaigning: The New Marketing of Politics*, United Kingdom, Blackwell, 1997
- Lance, Bennet & Robert Entman (ed), *Mediated Politics: Communication in the future of Democracy*, Cambrige University Press, 2001
- Lesmana, Tjipta, *Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa*, Gramedia, 2008

- Lichtenberg, Judith, *Democracy and The Mass Media*, Cambridge University Press, 1990
- Lilleker, Darren G, & Less-Marshment, Jennifer. (ed), *Political Marketing, A Comparative Perspective*, Manchester University Press, 2005
- Littlejohn, Stephen W. & Foos, Karen A, *Theories of Human Communication*, Thomson Wadsworth, Eight Edition, 2005
- Maurice Duverger, 1982, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali, hlm 174-175.
- Nas, Jayadi, 2007, *Konflik Elite Politik Lokal Sulawesi Selatan, Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal*, Lembaga Penerbitan Unhas, Makassar.
- Newman, Bruce. I (ed), *The Handbook of Political Marketing*, Sage, 1999
- Nursal, Ahmad, *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu: Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Gramedia, 2004
- Pruilt Dean J and Rubin Jefry Z, *Teori Konflik Sosial*, 2004 Hlm. 151
- Rahman Arifin, "Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional" (Surabaya, SIC : 2002), hlm. 184
- Rauf, Maswadi, 2000, *Konsensus Politik: Sebuah Penjenjangan Teoritis*, Jakarta: Dirgen Dikti Depdiknas.
- Robbin Stephen P, 1978. *Administrative Process : Integrating theory and practice*, New Delhi 29
- Robert michael, *Partai Politik dalam Kecendrungan Oligarkis dalam Birokrasi*, hlm. 24
- S.N. Kartikasari (penyunting), 2000, *Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council, hlm 4 22
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, 2013, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Surbakti, Ramlan *Memahami Ilmu Politik* ,(Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana : 1999), hlm.75
- _____, 1984, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Surabaya: Airlangga University Press.
- _____, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Surabaya : Airlangga University Press, 1984, hlm 21-32